

**PERSEPSI MAHASISWA UNIVERTAS LAMPUNG TERHADAP KEBIJAKAN
KENAIKAN TUNJANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)**

TUGAS INDIVIDU

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah

Metode Penelitian Administrasi Publik



Oleh:

Reza Tri Anggara

2456041040

Dosen Pengampu:

Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan Lembaga legislatif penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, selain mempunyai peran dalam membuat undang – undang, mengawasi Tindakan pemerintah, dan mengelola anggaran negara, DPR juga mewakili rakyat dengan memperjuangkan kepentingan umum. Untuk mendukung tugasnya, anggota DPR menerima gaji pokok dan berbagai tunjangan, yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, kebijakan peningkatan tunjangan bagi anggota DPR pada tahun 2025 telah menimbulkan kontroversi luas di Masyarakat. Menurut laporan Seknas Fitra, pada tahun 2025, setiap anggota DPR berpotensi memperoleh penghasilan hingga Rp230 juta per bulan.¹

Termasuk tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta, total penghasilan bulanan anggota DPR bisa mencapai hingga Rp287 juta. Angka yang sangat besar ini mendapat kritik pedas dari berbagai pihak karena kenaikan tunjangan tersebut dinilai tidak seimbang dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih terpuruk akibat inflasi, kenaikan harga pangan, dan ketimpangan pendapatan. Situasi ini menunjukkan adanya jarak yang makin lebar antara para pemimpin politik dengan rakyat yang mereka wakili. Kesenjangan ini berpotensi memicu ketidakadilan struktural, di mana kebijakan yang seharusnya mensejahterakan rakyat justru lebih menguntungkan kelompok elit. Ahli kebijakan publik Yanuar Nugroho mengatakan bahwa sistem penggajian DPR saat ini sudah ketinggalan zaman karena memiliki banyak komponen tunjangan yang banyak lapisannya, sehingga menghalangi transparansi dan akuntabilitas. Ia membandingkannya dengan kue lapis yang batasnya tidak jelas (Kompas TV, 2025). Analogi ini menunjukkan bahwa sistem tunjangan DPR tidak hanya rumit, tetapi juga membuka kemungkinan terjadinya pemborosan dan inefisiensi dana. Dalam

¹ Oleh Forum and Transparansi Anggaran, 'Anggaran DPR RI : Antara Fungsi Konstitusional Dan Kemewahan Personal', 2026.

konteks pengelolaan keuangan publik, keadaan ini bertentangan dengan prinsip good governance yang menekankan pada kesederhanaan, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan uang negara. Selain itu, ketidaktransparan struktur tunjangan dapat menyebabkan krisis legitimasi.

Menurut teori legitimasi, kelangsungan suatu lembaga publik tidak hanya ditentukan oleh kewenangan resmi yang dimiliki, tetapi juga oleh dukungan dari masyarakat. Ketika masyarakat merasa pendapatan anggota DPR tidak sebanding dengan kinerja atau kondisi ekonomi rakyat, maka legitimasi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat akan menurun. Hal ini sejalan dengan pandangan Pramono (2025) yang menekankan bahwa kebijakan publik harus berorientasi pada kepentingan rakyat, keadilan sosial, dan akuntabilitas; tanpa hal itu, kebijakan akan sulit mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Kritik terhadap kenaikan tunjangan DPR juga memperkuat skeptisisme masyarakat terhadap lembaga legislatif. Masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, akademisi, dan lembaga pemantau anggaran, menginginkan transparansi dan keterbukaan informasi mengenai komponen gaji dan tunjangan. Jika DPR tidak memperbaiki sistem penggajian yang "berlapis-lapis" tersebut, maka hal ini tidak hanya merusak citra lembaga legislatif, tetapi juga berpotensi menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia.² Ia menekankan bahwa sistem tunjangan berlapis-lapis, layaknya "kue lapis", menghambat transparansi dan akuntabilitas. Kritik serupa dilontarkan oleh Subarsono, peneliti di Universitas Gadjah Mada, yang menyatakan bahwa peningkatan tunjangan DPR di tengah krisis ekonomi justru menambah beban anggaran negara dan menunjukkan kurangnya empati sosial di kalangan elit politik (Detik Edu, 2025).³

Lembaga Pengawas Korupsi Indonesia (ICW) telah meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merahasiakan informasi mengenai gaji dan

²² Mulyana Eka Kurniawan, 'Pakar Kebijakan Publik Menilai Dasar Remunerasi Anggota DPR Sudah Usang, Tunjangan Seperti Kue Lapis', *Kompastv.Com*, 2025 <<https://www.kompas.tv/nasional/614058/pakar-kebijakan-publik-menilai-dasar-remunerasi-anggota-dpr-sudah-usang-tunjangan-seperti-kue-lapis?utm>> [accessed 1 September 2025].

³ Zulfikar Fahri, 'Tunjangan DPR Naik Di Tengah Ekonomi Sulit, Dosen UGM: Menambah Beban APBN', *Detikedu.Com*, 2025 <<https://www.detik.com/edu/edutainment/d-8074014/tunjangan-dpr-naik-di-tengah-ekonomi-sulit-dosen-ugm-menambah-beban-apbn?utm>> [accessed 1 September 2025].

tunjangan secara jelas dan terbuka. Hal ini sangat penting agar masyarakat dapat mengevaluasi cara pengelolaan dana publik yang diberikan kepada pejabat negara (Media Indonesia, 2025). Permintaan ICW bukanlah kebetulan, karena selama ini gaji dan tunjangan anggota DPR sering diatur dalam beberapa bagian yang rumit, sehingga sulit dipahami oleh masyarakat biasa. Hal ini bisa menciptakan keraguan publik bahwa ada kecurangan dalam penggunaan anggaran atau ketidakadilan dalam penyaluran dana negara untuk kepentingan kelompok tertentu. Membuka informasi tentang gaji dan tunjangan bukan hanya urusan administratif, tetapi juga berkaitan dengan prinsip transparansi dan tanggung jawab dalam mengelola pemerintahan.

Dalam praktek pemerintahan yang baik (good governance), transparansi dianggap sebagai bagian utama untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan rakyat (Santosa, 2022). Tanpa ada informasi yang terbuka, masyarakat sulit menilai apakah gaji yang diberikan kepada anggota DPR sesuai dengan kerja dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat.

Selain itu, permintaan ICW juga terkait dengan teori legitimasi.

Teori ini menyatakan bahwa kelangsungan sebuah lembaga publik sangat bergantung pada tingkat penerimaan dari masyarakat terhadap kebijakan yang diambil. Jika DPR menolak untuk mengungkapkan rincian gaji dan tunjangan, masyarakat dapat menilai lembaga tersebut tidak transparan, yang selanjutnya dapat mengurangi legitimasi politik DPR di mata rakyat. Sebaliknya, jika DPR bersedia membuka informasi secara jujur, ini bisa jadi langkah penting untuk memperbaiki citra dan memulihkan kepercayaan publik. Permintaan ICW juga menunjukkan peran penting organisasi masyarakat sipil (civil society organizations) dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Organisasi seperti ICW bertugas sebagai penyeimbang kekuasaan dengan menyoroti kebijakan yang dianggap tidak adil atau berpotensi merugikan masyarakat. Dalam konteks ini, suara ICW sesuai dengan harapan masyarakat,

termasuk mahasiswa, yang meminta kebijakan publik dijalankan secara jujur, transparan, dan mengutamakan kepentingan rakyat banyak..⁴

Lebih lanjut, Strategic News (2025) membahas perbedaan besar dalam penghasilan antara anggota DPR dengan pegawai yang gajinya hanya UMP. Anggota DPR bisa mendapat penghasilan ratusan juta rupiah per bulan, sedangkan pegawai yang gajinya UMP seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, guru honorer seringkali mendapat upah di bawah standar hidup yang layak. Perbedaan yang sangat jelas ini membentuk persepsi tentang ketidakadilan struktural yang bisa melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR. Ketidakadilan ini bukan hanya soal angka, melainkan juga soal cara pemerintah mengatur kebijakan yang tidak adil. DPR yang seharusnya berperan untuk mewakili rakyat justru memperkuat kesan eksklusif dengan menjadikan kesejahteraan anggotanya lebih tinggi dari yang mereka wakili. Ini memperkuat anggapan bahwa peningkatan tunjangan DPR terkesan memihak segelintir orang kaya dan tidak peka terhadap kondisi masyarakat, serta tidak mencerminkan nilai keadilan sosial seperti yang tertuang dalam konstitusi. Dari sudut pandang teori kebijakan publik, fenomena ini menunjukkan keterpurukan antara kepentingan elite politik dengan kebutuhan masyarakat umum.

Pramono (2025) menekankan bahwa kebijakan publik ideal harus mengutamakan keadilan sosial, kepentingan masyarakat, dan pertanggungjawaban. Jika suatu kebijakan justru memperlebar ketimpangan sosial dan membuat masyarakat protes, maka kebijakan tersebut bisa dibilang gagal memenuhi prinsip kebijakan publik yang benar. Selain itu, dalam kerangka teori legitimasi, ketidakadilan seperti ini bisa merusak hubungan antara DPR dengan masyarakat.

Legitimasi tidak hanya ditentukan oleh ketentuan hukum, tetapi juga dari pengakuan masyarakat. Jika masyarakat merasa bahwa kenaikan tunjangan DPR

⁴ Harahap Devi, 'ICW Desak DPR Buka Rincian Gaji Dan Tunjangan Ke Publik', *Mediaindonesia.Com*, 2025 <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/805273/icw-desak-dpr-buka-rincian-gaji-dan-tunjangan-ke-publik?utm_> [accessed 1 September 2025].

hanya menguntungkan sekelompok orang teratas, sementara jutaan orang lain hidup dalam kesulitan, maka kepercayaan masyarakat terhadap DPR sebagai perwakilan rakyat akan menurun.

Kondisi ini juga membuka ruang bagi munculnya kritik dari masyarakat sipil, termasuk kalangan mahasiswa. Sebagai bagian dari kelompok yang kritis, mahasiswa sering kali menilai ketidakadilan sosial sebagai isu utama yang harus diperhatikan melalui diskusi umum atau aksi bersama. Oleh karena itu, persepsi mahasiswa Universitas Lampung terhadap ketimpangan pendapatan antara DPR dan masyarakat berpenghasilan rendah perlu diteliti. Hal ini bukan hanya mencerminkan sikap kritis mereka terhadap DPR, tetapi juga menjadi indikator sejauh mana demokrasi Indonesia berjalan sesuai prinsip keadilan sosial.⁵ Kesenjangan ini menciptakan apa yang disebut ketidakadilan struktural. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang seharusnya mewakili rakyat, dianggap lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kesejahteraan masyarakat luas. Nurhadi, peneliti di Universitas Gadjah Mada, berpendapat bahwa kebijakan peningkatan tunjangan DPR mencerminkan kurangnya empati sosial dan dapat memperdalam kesenjangan kepercayaan publik [Times Indonesia, 2025].⁶

Teori legitimasi, yang menyatakan bahwa keberlangsungan sebuah institusi publik tidak hanya bergantung pada otoritas formal yang diberikan konstitusi atau undang-undang, tetapi juga pada tingkat penerimaan, kepercayaan, dan pengakuan masyarakat, mendukung fenomena kontroversial kenaikan tunjangan DPR. Ketika masyarakat percaya bahwa suatu kebijakan tidak mewakili keadilan sosial, transparansi, atau kepedulian terhadap kondisi rakyat, legitimasi lembaga pembuat kebijakan akan berkurang, meskipun kebijakan tersebut secara hukum sah. Dalam kasus DPR, kenaikan tunjangan yang dilakukan di tengah ketimpangan sosial-ekonomi masyarakat akan

⁵ Hidayat Nur Achmad, 'Ketimpangan Gaji DPR RI Terlalu Dalam, Benarkah, Apa Yang Harus Publik Perbuat?', *Strateginews.Com*, 2025 <https://strateginews.id/2025/08/25/ketimpangan-gaji-dpr-ri-terlalu-dalam-benarkah-apa-yang-harus-publik-perbuat/?utm_> [accessed 1 September 2025].

⁶ A. Tulung, 'Kenaikan Tunjangan DPR Dinilai Tak Berpihak Ke Rakyat, Akademisi UGM: Minim Empati Sosial', *TimesIndonesia.Com*, 2025 <https://timesindonesia.co.id/politik/552030/kenaikan-tunjangan-dpr-dinilai-tak-berpihak-ke-rakyat-akademisi-ugm-minim-empati-sosial?utm_> [accessed 1 September 2025].

menimbulkan resistensi publik, mengancam legitimasi politik DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Dalam teori kebijakan publik, Pramono (2025) menekankan bahwa tiga pilar utama harus selalu membentuk kebijakan: kepentingan publik, keadilan sosial, dan akuntabilitas [Pramono, 2025]. Kebijakan publik bukan hanya keputusan pemerintah; itu adalah alat untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan adil. Jika suatu kebijakan hanya mengejar kepentingan elit atau memperburuk ketimpangan, maka kebijakan tersebut tidak berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan bernegara.⁷

Prinsip pemerintahan yang baik menurut Lele dan Kumorotomo (2021) mengharuskan adanya transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam setiap kebijakan pemerintah [Lele & Kumorotomo, 2021]. Transparansi berarti setiap kebijakan harus terbuka dan bisa dilihat oleh masyarakat, termasuk semua informasi tentang penggunaan uang negara dan maksud dari kebijakan tersebut. Efisiensi berarti pengeluaran uang tidak boleh boros, tetapi digunakan sesuai kebutuhan masyarakat. Responsivitas berarti kebijakan harus mengacu pada kebutuhan masyarakat, bukan hanya kepentingan kelompok penguasa. Jika kebijakan justru menyebabkan ketidakadilan, ketegangan sosial, dan hilangnya kepercayaan masyarakat, maka kebijakan itu dinilai gagal dalam prinsip pemerintahan yang baik dan justru merusak kedudukan lembaga negara.

Dalam konteks ini, peran mahasiswa sangat penting. Sejak dulu, mahasiswa dikenal sebagai kelompok yang memiliki kemampuan berpikir kritis terhadap politik dan kebijakan pemerintah. Mereka sering bertindak sebagai agen perubahan yang mendorong kebijakan lebih demokratis, sebagai kekuatan moral yang menjaga keadilan, serta sebagai penyeimbang kekuasaan pemerintah. Dalam sejarah Indonesia, gerakan mahasiswa pada tahun 1966 berperan besar dalam menggulingkan Orde Lama, sedangkan gerakan mahasiswa pada tahun 1998 menjadi pemicu runtuhnya Orde Baru dan

⁷ Joko Pramono, *Pengantar Kebijakan Publik* (Unisri Press, 2025).

munculnya era reformasi. Bahkan setelah reformasi, mahasiswa tetap aktif mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil, seperti penolakan kenaikan harga BBM, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, hingga isu korupsi di lembaga legislatif. Fakta ini menunjukkan bahwa mahasiswa selalu menjadi bagian penting dalam dinamika demokrasi Indonesia, bukan hanya menerima kebijakan, tetapi juga mengawasi dan memperbaiki kebijakan pemerintahan. Dalam kasus kenaikan tunjangan anggota DPR, mahasiswa memiliki posisi penting karena mampu melihat isu dari sudut pandang keadilan sosial dan pengelolaan anggaran secara rasional.

Sebagai kelompok yang terdidik, mereka tidak hanya menilai kebijakan dari sisi norma, tetapi juga mengkritik apakah kebijakan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan kebutuhan masyarakat. Kritik yang diberikan oleh mahasiswa bisa menjadi gejala awal adanya masalah kepercayaan publik, karena suara mereka sering dianggap sebagai wakil dari keinginan rakyat secara luas. Selain itu, mahasiswa juga bisa menjadi jembatan antara masyarakat sipil dan pemerintah. Melalui berbagai bentuk aksi seperti demonstrasi, penelitian akademis, atau kampanye di media digital, mereka bisa menyampaikan suara masyarakat yang biasanya tidak terdengar dalam proses politik resmi. Dengan demikian, pandangan mahasiswa terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR tidak hanya sekedar pendapat, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme kontrol demokratis terhadap kebijakan yang diambil oleh pihak penguasa.⁸

Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi bagaimana pemerintahan berjalan agar tetap sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam teori, mahasiswa tidak hanya dianggap sebagai orang yang menerima kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang mampu memengaruhi arah kebijakan melalui pendapat, sikap, dan partisipasi bersama. Menurut Wijaya, Pudjiarti, dan Winarni (2018), “mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menjaga

⁸ Lele & Kumorotomo, *Tinjauan Studi Manajemen Dan Kebijakan Publik Di Indonesia*, 1st edn (UGM Press, 2021).

akuntabilitas pemerintahan, memengaruhi kebijakan publik, serta menjadi sarana untuk memperkecil kekuasaan pemerintah” (hlm. 24). Dengan demikian, pandangan mahasiswa Universitas Lampung terhadap kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR bisa diartikan sebagai bentuk peran mereka sebagai kelompok kritis yang mengawasi jalannya kebijakan publik.

Selanjutnya, konsep tata kelola pemerintahan yang baik, seperti yang dijelaskan Wijaya, Pudjiarti, dan Winarni (2018), menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsif, dan keadilan.

Jika kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR dinilai mahasiswa tidak transparan atau tidak menguntungkan rakyat, maka ini bisa dipandang sebagai kegagalan dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Artinya, pendapat mahasiswa tidak hanya menunjukkan opini pribadi, tetapi juga menunjukkan sikap masyarakat secara umum terhadap sejauh mana lembaga seperti DPR memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Universitas Lampung (Unila) sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terbesar di Sumatera menjadi tempat penting untuk memahami bagaimana mahasiswa memandang kebijakan publik yang kontroversial.

Keragaman latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya mahasiswa Unila membuat pandangan mereka mewakili suara generasi muda. Ini sesuai dengan pernyataan Wijaya, Pudjiarti, dan Winarni (2018), bahwa partisipasi masyarakat sipil dalam kebijakan publik tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengawas dan pengorektor ketika kebijakan dianggap menyimpang dari kepentingan rakyat. Dalam konteks kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR, mahasiswa mampu menilai apakah kebijakan tersebut sah secara hukum tetapi lemah secara legitimasi sosial.

Misalnya, kritik dan pandangan mahasiswa bisa menyoroti ketidakadilan ketika penghasilan anggota DPR meningkat drastis sementara banyak masyarakat masih menghadapi masalah kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, penelitian tentang persepsi mahasiswa Universitas Lampung terhadap

kebijakan kenaikan tunjangan DPR penting dilakukan, bukan hanya untuk memahami sikap mahasiswa, tetapi juga sebagai indikator sejauh mana kebijakan tersebut diterima oleh masyarakat yang berpendidikan.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi mahasiswa Universitas Lampung terhadap kebijakan kenaikan tunjangan DPR tahun 2025?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi persepsi mahasiswa Universitas Lampung terhadap kebijakan kenaikan tunjangan DPR?
3. Apa implikasi persepsi mahasiswa Universitas Lampung terhadap legitimasi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis persepsi mahasiswa Universitas Lampung terhadap kebijakan kenaikan tunjangan DPR tahun 2025.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi persepsi mahasiswa Universitas Lampung terhadap kebijakan kenaikan tunjangan DPR.
3. Untuk memahami implikasi persepsi mahasiswa terhadap legitimasi DPR dan prinsip good governance dalam penyelenggaraan kebijakan publik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur ilmu administrasi publik, khususnya yang terkait dengan teori kebijakan publik, good governance, dan legitimasi politik.

Menjadi referensi akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang menyoroti peran mahasiswa sebagai bagian dari civil society dalam mengawasi kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

⁹ Wijaya dkk, *TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK*, 1st edn (Demak, Jawa Tengah: Pustaka Magister, 2018).

Memberikan masukan bagi DPR agar lebih memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan pejabat publik.

Menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan dalam memperkuat peran mereka sebagai agen perubahan (agent of change) dan kekuatan moral (moral force) dalam sistem demokrasi.

Menjadi sumber informasi bagi masyarakat umum untuk memahami bagaimana generasi muda menilai kebijakan elit politik, sehingga dapat memperkuat kontrol sosial terhadap pemerintah.